

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Tauda, Gunawan, 2012, *Komisi Negara Independen (Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan)*, Yogyakarta.
- Ashiddiqie, Jimly, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Ashiddiqie, Jimly, 2008, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, BIP Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Ashiddiqie, Jimly, 2012, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asmara, Galang, 2005, *Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*, Leksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Asmara, Galang, 2011, *Ombudsman Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Laksbang Yustitia, Surabaya.

- Atmaja, I Dewa Gede, 2012, *Ilmu Negara “Sejarah, Konsep Negara dan Kajian Kenegaraan”*, Setara Press, Malang.
- Baharudin, Hamzah, Sebuah Disertasi, 2007, *Hak Gugat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Rangka Kontrol Terhadap Pelayanan Publik*, Unair, Surabaya.
- Dwiyanto, Agus, 2005, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 2011, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, Refika Aditama, Jakarta.
- Giddens, Anthony, 1998, *The Third Way : Jalan Ketiga Pembangunan Demokrasi Sosial*, Gramedia, Jakarta.
- H.M. Thalhan dan dan Sobirin Malian, 2011, *Perkembangan Lembaga-Lembaga Negara di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Hadjon, P.M., 1994, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hamidi, Jazim dan Lutfi, Mustafa, 2009, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Alumni, Malang.
- Handoyo, B. Hestu Cipto, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia “Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi”*, Universitas Atma Jaya Press, Jakarta.
- Indrati, Maria Farida, 1998, *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)*, Kanisius, Jakarta.
- Kusnardi, Moh dan Ibrahim ,Harmaily, 1985, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

- Lotulung, Paulus Effendi, 1993, *Beberapa sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lukman, Samapara, 2000, *Pengembangan Pelaksanaan Pelayanan Prima*, LAN, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH-UII, Yogyakarta.
- Marbun, S.F. et.all, 2005, *Dimensi Pemikiran Hukum Adminsitrasi Negara*, UII Press, Jakarta.
- Muchsan, 2000, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan PTUN*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, AbdulKadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Karya Bakti, Bandung.
- Pamudji, 1994, *Perbandingan Pemerintahan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Ranawijaya, Usep, 1983, *Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sirajuddin, et.all, 2011, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Malang.
- Soehino, 1998, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Suharsono, A.G., 2005, *Pelayanan Publik yang Efisien, Responsif dan Nonpartisan Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sujamto, 1983, *Beberapa pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sujata, Antonius et. all, 2002, *Ombudsman Indonesia “Masa Lalu, Sekarang dan Masa Mendatang”*, Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Thamrin, Husni, 2013, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Aswaja, Yogyakarta.

Tim Peneliti Lemlit UI, 2002, Naskah Akademik RUU tentang Pelayanan Publik, Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, Jakarta.

Tjandra, W. Riawan, 2014, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta.

Utrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta.

Makalah dan Jurnal

Denny Indrayana dalam Supriyadi dan Indriaswati, 2007, *Catatan Umum Atas Keberadaan Komisi Negara Di Indonesia*, jurnal Legislasi Indonesia Vol.4 No.3 September 2007.

Marbun, S.F., 1997, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol. 4.

Masduki, Teten, 2003, Sebuah Makalah, *Ombudsman Daerah dan Pemberdayaannya*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia bekerja sama dengan Partnership for Governance Reform in Indonesia, Yogyakarta.

Yazid, T.M. Luthfi, Sebuah Makalah, 2004, "*Komisi-komisi Nasional dalam Konteks Cita-cita Negara Hukum*", Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik*.
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang *Ombudsman Republik Indonesia*.
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang *Komisi Ombudsman Nasional*.
5. PP Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah.
6. Peraturan ORI Nomor 002 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan.